

ARTIKEL

UPAYA MENINGKATKAN KOORDINASI DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN WONOSOBO

Oleh :

Sukron Amin, Faturrahman, Zainal Hidayat

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Coordination is absolutely essential in a good organization of public organizations as well as private organizations. Coordination is carried out to create a uniform and harmonious effort on target. In an effort to develop the region's tourism industry, cross-sector coordination is needed to help harmonize and synchronize the roles of the actors of development, namely the Government, the private and the public. Coordination is needed from the level of planning up to evaluation activities.

Research used are a descriptive qualitative, and thus use the phenomenon in which it contained the principal interview. Phenomenon that be used as reference is the delegation of authority, communication, budget, the coordinator, the mechanism of a pattern of coordination. The phenomenon that is then be used as reference to know the role of coordination and thruster and inhibitors factor in improving the coordination of traffic sectors. An interview conducted to 3 head of dept. namely dept. of tourism and culture communication and informatic department of transportation, district wonosobo, public works department and one of the owner of the bureau of tourism.

Based on the results of the interview has been done can be noted that in the development of the tourism industry, involving the role of the Government (Office of tourism and culture, public works, Transportation and Communication Department of Informatics) private (travel agency tourism) and the role of the community. Therefore cross-cutting coordination is needed both in the planning, implementation and evaluation process of course with effective communication. The active role of the actors of development becomes the driving factor in coordination, and differences in the orientation of the time and also the limited budget of dijadikan inhibitor of factor, because each implementation activity, each of these actors do not have the same time and an adequate budget.

Keyword : *Coordination, Communication, Tourism*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang ada di Kabupaten Wonosobo karena sesuai dengan kekhasan dan kondisi alam yang memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilaksanakannya pembangunan dibidang pariwisata bukan tidak mungkin Kabupaten Wonosobo akan menjadi daerah yang semakin otonom. Karena bukan rahasia umum lagi bila sektor kepariwisataan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila di kelola secara efektif dan efisien.

Koordinasi sangatlah penting di dalam suatu organisasi baik organisasi publik maupun organisasi swasta. Koordinasi dilakukan untuk menciptakan suatu usaha yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo melalui visi, misi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan industri pariwisata yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat apakah telah melakukan koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait. Namun pada kenyataannya masih ditemukan hal-hal yang dapat diartikan bahwa belum adanya koordinasi yang baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dengan Instansi terkait maupun masyarakat. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

1. Adanya salah satu jembatan yang terdapat pada jalan utama menuju

kawasan wisata yang sering rusak yang disebabkan oleh tanah longsor di daerah lereng pegunungan Dieng (Desa Tieng).

2. Adanya beberapa jalan menuju kawasan wisata yang terbengkalai yang mengurangi rasa nyaman bahkan membahayakan bagi wisatawan maupun masyarakat.
3. Kurangnya alat transportasi seperti angkutan orang di kawasan wisata khususnya dataran tinggi Dieng, sehingga bagi wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi akan kesulitan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata.
4. Terbatasnya jumlah biro penyedia perjalanan wisata di Kabupaten Wonosobo.

Dari beberapa faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai faktor utama selain pihak swasta dan masyarakat dinilai kurang optimal dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk membangun pariwisata daerah. Lalu bagaimanakah pengelolaan pariwisata daerah selama ini. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengembangan industri pariwisata daerah, apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten. Tentunya bila dibiarkan tanpa ada pemecahan ini bertentangan dengan apa yang diharapkan pemerintah guna mengembangkan industri pariwisata daerah berdaya saing.

Atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan, penulis merasa memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji tentang koordinasi dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Di dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Upaya Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam Mengembangkan**

Industri Pariwisata di Kabupaten Wonosobo”.

B. TUJUAN

Untuk merumuskan upaya-upaya peningkatan koordinasi lintas sektor oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dengan Dinas terkait dalam upaya pengembangan industri pariwisata daerah.

C. TEORI Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Stoner dalam (Sugandha, 1988:13) “proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Fungsi koordinasi sangat penting, apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub-sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar administrasi berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sutarto (2006:145-146) koordinasi sebenarnya dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi semuanya berdasarkan keselarasan. Atas dasar itu, koordinasi dapat berasaskan bahwa di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan antar pejabat.

Upaya Peningkatan Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha yang penting dilakukan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kerja untuk mewujudkan tujuan secara optimal. Tanpa koordinasi yang baik dalam lembaga

akan sulit untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Peningkatan koordinasi diperlukan supaya dalam pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

Menurut Sutarto (2006:152-153) peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Mengangkat koordinator

Usaha dalam menyelaraskan antar bagian dalam organisasi maupun antar unit kerja diperlukan seorang koordinator. Dengan adanya seorang koordinator, apabila ada suatu masalah maka dapat diselesaikan dengan baik dan cepat oleh seorang koordinator atau dapat berupa satuan organisasi misalkan BKKBN.

2. Mengadakan pertemuan formal maupun informal antar pejabat.

Pemantapan koordinasi dapat dilakukan dengan mengadakan rapat antar organisasi, antar bagian dalam organisasi maupun antar unit kerja.

3. Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan.

Dengan adanya buku pedoman kerja maka dapat dijamin adanya kesatuan tafsir dan kesatuan langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara pejabat maupun bagian-bagian organisasi.

4. Berhubungan melalui alat perhubungan.

Dalam melakukan koordinasi antar pejabat maupun bagian-bagian organisasi yang berjarak jauh dapat dilakukan tanpa mereka bertemu satu sama lain yaitu dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon, handphone, radiogram, telegram dan

bahkan menggunakan jejaring sosial yang sedang ramai seperti sekarang ini.

5. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan.

Koordinasi semacam ini melalui edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan digunakan ketika seorang koordinator mendapati suatu masalah yang harus diputuskan kemudian memerlukan pendapat dari koordinator lainnya agar nantinya ada kesatuan paham dan kesatuan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut.

6. Membuat tanda-tanda, simbol dan kode.

Untuk mendapatkan koordinasi yang efektif dan efisien, koordinator atau bagian-bagian organisasi dapat membuat tanda-tanda, simbol dan kode yang bisa disepakati bersama demi terciptanya koordinasi yang baik.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Drs. H. Alizar dengan judul "Peningkatan Koordinasi antar Instansi Vertikal", peningkatan koordinasi dapat dibentuk mulai dari:

1. Peningkatan kualitas aparat pelaksana.
2. Koordinasi dimulai dari tingkat perencanaan sampai tahap evaluasi.
3. Mekanisme dan penyelenggaraan koordinasi harus jelas.
4. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik.

D. METODE

Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ tidak tertulis dari pelaku-pelaku yang diamati.

Situs penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan fokus yang diambil yakni mengenai koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, maka situs dari penelitian ini adalah bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo.

Informan penelitian

Informan yang dipilih yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Biro perjalanan wisata.

Jenis data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau symbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

Sumber data

Data primer data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Dan Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data

Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data

Analisis data yang dipakai adalah Analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain (struktur internal domain) dan pengumpulan hal – hal atau elemen yang sama.

Kualitas data

Cara yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.

3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dalam meningkatkan koordinasi, maka ada 8 instrumen yang akan diteliti yaitu Partisipasi dalam Pengembangan Industri Pariwisata, Pendelegasian Wewenang, Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor, Anggaran dalam Koordinasi Lintas Sektor, Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi, Mekanisme Pola Koordinasi Lintas Sektor, Faktor Pendorong dan Penghambat Koordinasi, Manfaat Koordinasi Lintas Sektor.

Partisipasi dalam Pengembangan Industri Pariwisata

Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri berperan sebagai pemangku adanya program pengembangan industri. Kemudian Dinas Pariwisata didukung oleh Dinas Dinas Pekerjaan umum yang berperan sebagai pembangun sarana prasarana khususnya infrastruktur dalam mengakses objek-objek wisata. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga di dukung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berperan dalam mengatur dan memberi pelayanan dalam hal transportasi umum untuk wisatawan maupun masyarakat dalam mengakses objek wisata di Kabupaten Wonosobo. Masyarakat sebagai stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah. UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Pendelegasian Wewenang

Menurut Pak Suprayudi selaku Kepala Bagian Pengembangan Destinasi bahwa pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengembangan industri pariwisata menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pada bagian ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kepariwisataan. Beliau juga menjelaskan bahwa koordinasi juga dilakukan antar daerah yaitu dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Bapak Drs. One Andang sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa pendelegasian wewenang secara khusus dalam mengembangkan pariwisata tidak ada, namun beliau menegaskan bahwa Bagian dalam organisasinya menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor

Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi bisa terjadi dalam bentuk komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal terjadi seperti rapat bulanan atau rapat dalam forum SKPD. Sedangkan komunikasi yang bersifat informal dapat terjadi seperti pertemuan antar pejabat/pegawai Dinas diluar jam kerja. Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi juga menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan menggunakan jaringan internet.

Anggaran dalam Koordinasi Lintas Sektor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya alokasi anggaran yang di

khususkan dalam berkoordinasi. Anggaran dalam berkoordinasi yang bersifat formal disebutkan telah menjadi bagian dari masing-masing kegiatan. Sedangkan koordinasi yang sifatnya informal, menggunakan anggaran dari masing-masing pejabat/pegawai Dinas.

Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi

Komitmen dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu membangun Pariwisata daerah yang lebih maju dengan menciptakan masyarakat sadar wisata yang kemudian masyarakat terangkat dari segi ekonominya dari penjualan produk dan jasa bagi wisatawan. Dengan terangkatnya perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata itulah yang menjadi komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga mempunyai komitmen dalam mengembangkan industri pariwisata daerah dengan mendukung terciptanya transportasi dan arus lalu lintas yang aman dan nyaman. Dengan transportasi yang aman dan nyaman maka diharapkan menjadi nilai yang positif di mata wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Mekanisme Pola Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi akan menciptakan sinergi dalam arti terciptanya perpaduan usaha dari berbagai orang, unit, atau organisasi yang menghasilkan output yang lebih besar dibanding jumlah output masing-masing orang, unit atau organisasi bila mereka bekerja sendiri-sendiri atau tanpa koordinasi. Mekanisme pola koordinasi diperlukan komunikasi yang baik, pemimpin sebagai fasilitator dan beberapa fasilitas dalam mekanisme koordinasi

seperti forum-forum diskusi, organisasi matriks.

Faktor Pendorong dan Penghambat Koordinasi

Faktor penghambat adanya program pengembangan industri pariwisata ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui hasil wawancara kepada Pak Aziz selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonsobo berikut ini :

“ ya sebenarnya ada beberapa faktor yang menghambat misalnya faktor anggaran, waktu dan ya faktor ego tadi yang kita bicarakan di awal. Faktor anggaran sudah jelas ketika anggaran program masing-masing SKPD itu kan berbeda jadi nanti untuk penyatuan program antar SKPD jadi sulit karena terbatasnya anggaran. Masalah waktu juga menghambat akan koordinasi kenapa? Misalkan program pengembangan industri pariwisata ini kan lebih memperhatikan pada masalah-masalah yang harus dipecahkan, nah di dalamnya kan kita temukan pembangunan infrastruktur itu sangat penting, nah dari situ dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur harus melalui tahap survey, pengukuran baru proses itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.”

Manfaat Koordinasi Lintas Sektor

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa manfaat dari koordinasi lintas sektoral tersebut dapat membantu antar SKPD dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pembangunan kepariwisataannya ditunjang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan kepariwisataan seperti

transportasi, rambu-rambu jalan dan sebagainya dapat diatasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

B. ANALISIS

Partisipasi dalam Pengembangan Industri Pariwisata

Program pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Swasta (biro perjalanan wisata) dan Masyarakat. Semua pihak ini memiliki partisipasi yang berbeda menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Namun ada beberapa partisipasi dari masyarakat dan swasta yang perlu untuk ditingkatkan lagi.

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo di mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten yang mendelegasikan wewenang kepada beberapa SKPD yang terkait, dalam penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pendelegasian / pelimpahan wewenang dalam pengembangan industri pariwisata maupun mendorong pengembangan pariwisata sudah menjadi tugas pada masing-masing bagian di dalam Instansi yang terkait tersebut.

Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor

Dalam penerapan koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo komunikasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Komunikasi secara formal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo seperti rapat antar instansi secara berkala atau spontanitas dan juga musyawarah dalam forum kemudian juga melalui musrenbang. Kemudian komunikasi informal juga terselenggara manakala pertemuan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, seperti bertemu dan ngobrol di kantin pada jam makan siang, melalui telepon, upacara suatu kegiatan yang melibatkan beberapa SKPD, atau menggunakan media jejaring sosial. Penggunaan alat komunikasi seperti handphone, internet juga dilakukan dalam berkomunikasi.

Anggaran dalam Koordinasi Lintas Sektor

Diketahui bahwa terjadi ketidak jelasan dalam penganggaran yang dikhususkan untuk menyelenggarakan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Pasalnya dalam melakukan komunikasi informal antar pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, masing-masing menggunakan anggaran biaya sendiri. Namun ketika komunikasi formal dilakukan seperti rapat antar SKPD, dalam penganggarnya telah termasuk di dalam anggaran kegiatan program.

Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi

Dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo tidak dibentuk seorang/badan sebagai koordinator yang sifatnya khusus, namun seorang koordinator tersebut telah termasuk di dalam bagian organisasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Koordinator tersebut

seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Bagian.

Masing-masing Koordinator dari SKPD yang terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Wonosobo dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Mekanisme Pola Koordinasi Lintas Sektor

Mekanisme koordinasi lintas sektor dimulai pada tataran tertinggi yaitu proses perumusan (RPJPD) dalam waktu 20 tahun yang mengacu pada RPJP Provinsi. Kemudian perumusan (RPJMD) yang mengacu pada RPJPD. Kemudian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah melalui Musrenbang yang melibatkan (*stakeholder*). Tahap selanjutnya koordinasi dalam forum SKPD. Di dalam forum SKPD tersebut akan dilakukan sinkronisasi program-program antar SKPD. Koordinasi juga terjadi dalam proses implementasi dan evaluasi.

Faktor Pendorong dan Penghambat Koordinasi

Faktor Pendorong

- a. Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo yaitu memajukan Pariwisata daerah yang berdaya saing.
- b. UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- c. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Partisipasi aktif dari para pelaku pembangunan yang mendorong kegiatan pengembangan industri pariwisata.

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya alokasi anggaran dalam pengembangan pariwisata.

- b. Perbedaan terhadap orientasi waktu antar pelaku pembangunan.
- c. Perbedaan pemahaman antar pribadi.
- d. Kemampuan individu dalam berkomunikasi.

Manfaat Koordinasi Lintas Sektor

- a. Terciptanya kesamaan dalam pembuatan kebijakan oleh pihak yang terkait dalam mengembangkan industri pariwisata.
- b. Implementasi kegiatan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.
- c. Masalah-masalah dalam pengembangan industri pariwisata dapat terselesaikan.
- d. Tercapainya tujuan yaitu menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah tujuan wisata yang dapat dilihat dari pencapaian target 100% pendapatan di sektor pariwisata.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo ini pada kenyataannya memang menghadapi beberapa kendala, sehingga membuat kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo saat ini berjalan dengan apa adanya bahkan cenderung monoton tanpa ada sentuhan yang berarti meskipun terpenuhinya pencapaian beberapa target. Dari kondisi ini, diketahui bahwa yang menjadi masalah pada koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan industri pariwisata adalah terbatasnya anggaran dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat yang masih lemah. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan langkah-langkah yang penulis usulkan berikut ini.

B. REKOMENDASI

1. Meningkatkan posisi kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

Perkembangan industri pariwisata tentunya melibatkan banyak sektor yang memiliki kepentingan masing-masing, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dengan segala motivasi dan tujuannya. Mengembangkan dan menggalakan kerja sama kemitraan dalam kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu cara untuk saling memperkuat dan meningkatkan daya saing. Prinsip dasar kemitraan yaitu mengusung kesetaraan, transparansi, formal dan legal, saling memperkuat, saling memahami, saling menguntungkan. Dalam meningkatkan kemitraan dalam usaha pariwisata, dilakukan dengan mendudukkan kembali dengan tepat prinsip-prinsip kemitraan tersebut yaitu :

- a. Dianjurkan pihak swasta dan masyarakat bisa mengambil peran yang sejajar dalam langkah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo.
- b. Menciptakan saling ketergantungan dan mempertahankan keseimbangan hubungan kemitraan yaitu antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta dan masyarakat karena jika hubungan ketiga pihak tersebut tidak berjalan dengan baik maka pembangunan pariwisata akan terhambat.
- c. Memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan kemitraan yang dijalankan dengan pembuatan peraturan daerah atau keputusan Bupati. Dengan hal tersebut maka para investor akan merasa aman dalam peran sebagai aktor pembangunan.
- d. Meningkatkan kearifan peran Pemerintah Kabupaten sebagai

penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk mengembangkan, mengarahkan, mendorong, dan memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

2. Mengalokasikan anggaran yang jelas dan mencukupi untuk melakukan koordinasi.

Dalam proses perencanaan dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Wonosobo, juga dilakukan penganggaran yang jelas dan tepat untuk menyelenggarakan koordinasi mengingat kegiatan pengembangan industri pariwisata melibatkan banyak pihak. Penganggaran tersebut seperti berapa kali dalam menyelenggarakan rapat koordinasi antar SKPD dengan estimasi biaya yang tepat dan jelas. Dengan anggaran biaya untuk menyelenggarakan koordinasi lintas sektor yang jelas dan tepat maka akan mendorong terciptanya keselarasan, kesatuan tindakan dari setiap individu, bagian, masing-masing Dinas dalam organisasi yaitu Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terwujudnya Wonosobo sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugandha, Dann N. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Jurnal *Peningkatan Koordinasi antar Instansi Vertikal*, pengarang Drs. H. Alizar
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999